

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disebut TNI adalah suatu organisasi militer yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tugas selaku alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa dari ancaman luar maupun dalam negeri, sedangkan substansi kedudukan TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.¹ Militer atau yang sering disebut prajurit adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Hal ini tercantum dalam pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Perang Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rakyat Indonesia, lahir dari usaha dan perjuangan kemerdekaan bangsa, serta dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Angkatan Perang yaitu :

- Angkatan Darat
- Angkatan Laut

¹ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. v

- Angkatan Udara²

Negara yang berdaulat pasti memiliki organisasi militer yang bertugas sebagai alat pertahanan negara yang sangat diperlukan untuk menopang eksistensi kedaulatan negara. Organisasi militer yang dimaksud memiliki aturan disiplin yang berlaku internal bagi setiap anggota³. Institusi militer yang ada di Indonesia merupakan institusi yang unik karena memiliki tugas dan peran yang khas dalam struktur kenegaraan. Institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketahanan negara. Hampir seluruh Institusi militer di dunia memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai Peradilan Militer.⁴ Peradilan Militer telah dibentuk tersendiri sejak awal masa kemerdekaan. Peradilan Militer mencakup pengertian yang sangat luas, terdapat juga istilah yang dipakai untuk pengertian Pengadilan Militer, yaitu Peradilan Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi, dan sebagainya. Konsideran peraturan yang pertama kali dikeluarkan mengenai hal ini, adalah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara , ditegaskan mengenai pentingnya Peradilan Militer dibentuk tersendiri diluar Peradilan Umum. Peradilan Militer perlu dibentuk sendiri karena adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan para anggota militer atau tentara, yaitu:

² Moch. Faisal Salam, 2016, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cv Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.

³ *Ibid*, hlm.47.

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela, dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dengan cara berperang;
2. Dibutuhkannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta Pendidikan yang khusus sesuai dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu;
3. Diperbolehkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya; dan
4. Dibutuhkannya, aturan-aturan dan norma-norma huku yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar besikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Alasan yang demikian itulah diperlukan adanya badan peradilan, yang disamping memenuhi syarat-syarat seperti lazimnya badan-badan peradilan umumnya, juga mempunyai kemampuan untuk menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan suatu angkatan perang dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.⁵ Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang

⁵ *Ibid.* hlm.49-50.

mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang disamakan dengan prajurit dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.⁶

TNI dalam melakukan tugasnya diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api sesuai dengan standar perlengkapan militer yang ada. TNI membatasi penggunaan senjata api untuk mencegah penyalahgunaan yaitu dalam kondisi damai atau non-tempur. Anggota TNI yang diperbolehkan membawa senjata api saat kondisi Non-tempur adalah mereka yang sedang bertugas jaga, latihan serta anggota intelejen dan pengamanan. TNI yang diperbolehkan membawa senjata api keluar markas adalah perwira atas, perwira menengah, pangkat serendah-rendahnya kolonel namun memiliki tugas khusus, dan purnawirawan perwira tinggi dan menengah dengan pangkat terakhir kolonel yang memiliki jabatan penting di pemerintahan/swasta.⁷ Pengaturan tentang senjata api terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api dan Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL, 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 tahun 1948. Selain dua ketentuan Undang-Undang tersebut sebenarnya telah banyak aturan perundang-undangan yang mengatur

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.194-195.

⁷ <http://kanalhukum.id/kanalis/prosedur-kepemilikan-senjata-api-legal-di-indonesia/49>, hari rabu 28 Maret 2016, pukul 23.00 wib

tentang dasar hukum dan kebijakan kepemilikan senjata api, aturan tersebut antara lain ;

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.
2. Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Strafbepalingen.
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementrian pertahanan dan TNI.

Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ORDONNANTIE JDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” menyebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.⁸

Senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontrakan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari ledakan amunisi. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar

⁸ <https://nofryhardi.wordpress.com/2016/10/19/pengaturan-senjata-api-dalam-uu-no-12-tahun-1951/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 22.30 wib.

lingkungan kementerian pertahanan dan TNI. Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik dan benar sesuai prosedur serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan /atau amunisi. Senjata api, amunisi dan mesiu merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara illegal akan mengganggu ketertiban umum dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Fakta-fakta yang terdapat dimasyarakat masih banyak terjadi kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota TNI, salah satunya adalah kelalaian penggunaan senjata api seperti meletakkan pistol ditempat sembarangan yang dapat dijangkau oleh orang lain, menjual senjata illegal kepada warga sipil, ketika latihan menembak yang bersangkutan lupa membawa senjata api, dan sebagainya. Bentuk kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota TNI yang biasa terjadi dimasyarakat adalah dikarenakan hal-hal yang tidak disengaja. Syarat dan prosedur yang ketat sangat diperlukan agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan senjata api serta diperlukannya tes kejiwaan dan mental yang rutin adalah salah satu kunci untuk memastikan apakah anggota TNI yang diberikan wewenang dan tanggung jawab memegang senjata api masih memiliki

⁹ *Ibid.*

jiwa yang sehat. Khususnya di wilayah Yogyakarta kelalaian dalam penggunaan senjata api ini menjadi hal yang sering terjadi disetiap tahunnya di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “SANKSI BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL (STUDI KASUS DI WILAYAH PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan penggunaan senjata api oleh anggota TNI?
2. Apakah sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan korban meninggal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan senjata api yang diberikan kepada setiap anggota TNI.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada setiap anggota TNI yang melakukan kelalaian dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan korban meninggal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberi kemudahan berfikir bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum secara komprehensif terutama hukum yang berhubungan dengan bidang militer.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini menjadi masukan bagi Aparat Penegak Hukum berkaitan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal agar pelaku diberikan sanksi yang seadil-adilnya.

b. Bagi Masyarakat

Bahwa bagi masyarakat yang membaca, penelitian ini memberikan penjelasan ataupun pemahaman kepada masyarakat serta nantinya dapat mengawasi setiap tindakan anggota-anggota militer ketika berada dilingkungan masyarakat sipil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat sipil maupun anggota militer tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini harus lebih memperketat syarat-syarat perijinan kepemilikan senjata api baik sipil maupun aparat penegak hukum dan mempertegas sanksi khususnya kepada anggota TNI yang melakukan

kelalaian penggunaan senjata api, serta peran pemerintah untuk mengawasi peredaran senjata api harus lebih ditingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.

d. Bagi penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai tinjauan terhadap sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal ini bukan merupakan hasil plagiasi dan merupakan karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang ada adalah sebagai berikut :

1. Togi Marhara Sihite, 080200128 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2013 menulis dengan judul Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polri, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian RI tidak akan memperpanjang ijin kepemilikan senjata api bagi masyarakat yang terbukti menyalahgunakan senjata tersebut. Jika seseorang yang sudah memiliki ijin ternyata menyalahgunakan, kita akan cabut dan tidak diberikan ijin lagi.

2. Muhammad Rai Harahap, 10500110074 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014 menulis tentang Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api oleh aparat kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS.Bhayangkara, hasil penelitian penulis bertujuan untuk memaparkan wewenang dan tanggung jawab Kepolisian yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di Negara Indonesia khususnya di kota Makassar yang pada intinya mengarah pada tindak kelalaian pihak aparat Kepolisian dalam menggunakan senjata api yang terkadang melupakan aspek-aspek penggunaan senjata api yang sewajarnya mesti dipatuhi oleh aparat Kepolisian tersebut.
3. Vera Rahmadani, 1003101010037 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menulis tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh TNI-AD diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api adalah psikologi, sosiologi, lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam upaya menaggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata api dilakukan pencegahan preventif dan represif. Dalam penanggulangan terdapat berbagai hambatan seperti susahny menemukan tersangka, kurangnya disiplin militer, tidak adanya kesadaran hukum, serta kurangnya keimanan. Saran penulis kepada

Anggota TNI-AD agar menjaga amanah yang diberikan negara untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat dan tidak meresahkan masyarakat akibat dari senjata api yang dimiliki. Dan kepada kesatuan militer yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh agar melakukan tes psikologi setiap anggota TNI-AD yang memiliki senjata api secara rutinitas mengontrol psikologi anggota TNI-AD agar penyalahgunaan senjata api tidak terjadi lagi.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep sebagai berikut :

1. Kelalaian

Pengertian kelalaian adalah kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.

2. Senjata api

Senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontrakan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari ledakan amunisi. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI.

3. Anggota TNI

Pengertian TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, Prajurit adalah anggota TNI, dimana prajurit tersebut terbagi atas prajurit sukarela, prajurit wajib, dan prajurit siswa. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.

4. Korban

Pengertian korban adalah orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Militer
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Ordonnantie Idelijke Bijzondere Strafbepalingen
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
- 6) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa fakta hukum , doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang berkaitan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang cara memperoleh datanya dengan mencari pendapat hukum berupa literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen yang berhubungan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan bersifat terbuka

artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi dan keahliannya.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dan analisis, dideskripsikan, disistematiskan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Metode berpikir

Metode Berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan yang baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Sanksi bagi Anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : Pembahasan

Dalam Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan umum tentang peradilan militer, Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer, Tinjauan Umum tentang senjata api, dan analisis kasus terkait sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal.

BAB III : Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul.